

PERENCANAAN KOLABORASI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN

Ely Sufianti

Dosen STIA LAN Bandung
Jalan Cimandiri No. 34 - 38 Bandung
Email: tenistiani@yahoo.com

Collaborative Planning in Waste Management for Sustainable Environmental Development

Abstract

Collaborative Planning is planning practice co-existing with collaborative governance in public administrative perspective. Inclusiveness and participation of stakeholders are important aspects. Stakeholders do authentic dialogue which results in consensus. This activity is initiated by the government. Consensus then is implemented by all stakeholders for achieving the main goal. The steps of collaborative planning for waste management are deciding when to collaborate, setting up a successful process, determining who will participate, organizing the process, creating a decision-making structure, helping participants work together, sharing information, and implementing agreements.

Key words: collaborative planning, governance, waste management

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah sampai saat ini masih merupakan momok terutama bagi kota-kota besar. Masalah yang umum dijumpai adalah berkaitan dengan keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berakibat pada ketidakpuasan dengan penduduk sekitar. Penduduk sekitar menjadi korban dengan keberadaan TPA karena lingkungan yang menjadi sumber penyakit dan kemungkinan terjadinya longsor dari gunung sampah. TPA masih menjadi unsur penting karena pengelolaan sampah masih menggunakan sistem *open dumping* (penimbunan bebas). Pengelolaan sampah dengan cara ini hanya memindahkan permasalahan dari halaman rumah seseorang ke orang lain, dan ini menjadi fenomena yang dikenal sebagai NIMBY (*not in my backyard*).

Jumlah penduduk yang besar, ketidaksadaran akan pentingnya pengelolaan sampah dengan baik dan benar, serta kurang berfungsinya peran pemerintah merupakan sebab utama sehingga permasalahan tak kunjung terselesaikan. Namun hal ini tidak berarti permasalahan ini tidak dapat diselesaikan. Perlu digali alternatif lain yang dapat memecahkan masalah yang dapat dilaksanakan. Beberapa cara lain seperti penggunaan *incinerator* (pembakar sampah) telah dicoba, namun belum memperlihatkan hasilnya karena sebelum sampah masuk ke pembakaran, seharusnya dilakukan pemilahan dulu. Namun masyarakat belum terbiasa untuk melakukan pemilahan sampah. Peningkatan kesadaran masyarakat juga bukan hal mudah, karena terkait dengan pola pikir dan kebiasaan. Peningkatan peran pemerintah dapat

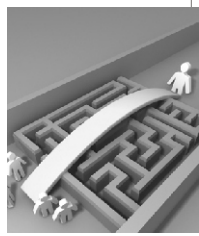
ditingkatkan efektivitasnya, meski tetap dengan dukungan seluruh pihak terkait. Hal ini akan menjadi topik dalam tulisan ini.

Tulisan ini bertujuan memaparkan konsep dan praktik perencanaan kolaborasi dalam pengelolaan sampah. Tulisan diawali dengan konsep dan teori perencanaan kolaborasi, praktik perencanaan kolaborasi dalam pengelolaan sampah dan analisis, serta diakhiri oleh penutup.

B. PARADIGMA GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Paradigma pembangunan saat ini tidak lagi bergantung pada peran pemerintah semata (*government*), tetapi berkembang menjadi pembangunan yang melibatkan *stakeholders* (*governance*). Yang dimaksud *stakeholders* (para pemangku kepentingan) yaitu pihak yang dipengaruhi oleh kebijakan, pihak yang dapat mempengaruhi kebijakan, dan pihak yang memiliki sumber daya dan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan (Smutko, 2006). Keterlibatan mereka diharapkan akan mengakomodir nilai dan kepentingan publik dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas keputusan publik, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta menghindari konflik. Keterlibatan pemangku kepentingan tiap program pembangunan akan berbeda. Mereka umumnya dapat dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok sesuai kepentingan dan perannya. Dalam *governance* terjadi proses interaksi yang berkesinambungan antara masyarakat dan negara

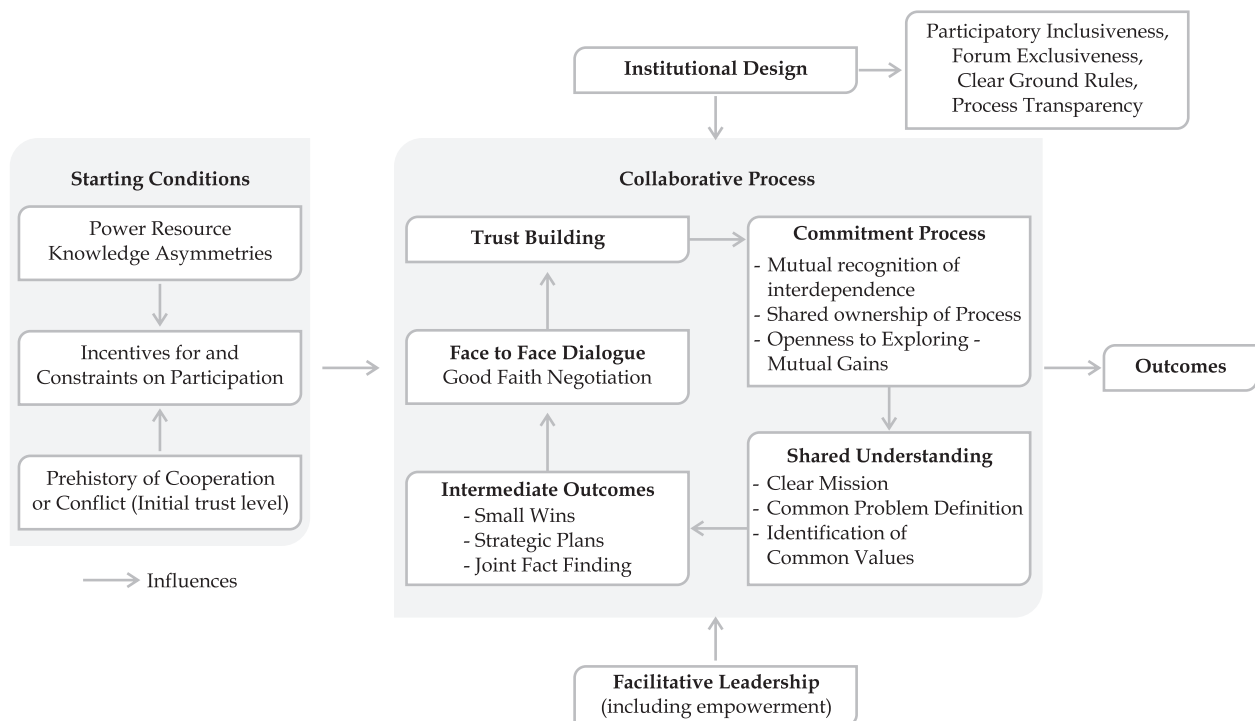




dalam pembangunan. Diutarakan oleh McCarney, Halfani, dan Rodriguez, bahwa *governance* merupakan “the relationship between civil society and the state, between rulers and the ruled, the government and the governed” (McCarney, 1996). Perubahan paradigma *government* menjadi *governance* juga diperlihatkan oleh berubahnya lembaga-lembaga publik yang awalnya dikendalikan oleh undang-undang (peraturan) menjadi lebih dijiwai oleh semangat mengutamakan kepentingan masyarakat (Bovaird dan Loffler, 2005). Proses *governance* tersebut dikatakan berhasil bila memenuhi indikator *Good governance*. Menurut UN-ESCAP indikator tersebut yaitu: *participatory, consensus oriented, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, equitable and inclusive and follows the rule of law*.

Paradigma *governance* di atas dijabarkan lebih lanjut oleh Anshell dan Gash (2008) dalam konsep *collaborative governance* (tatakelola kolaborasi), yaitu suatu proses yang memfasilitasi atau mendorong terjadinya kerjasama diantara stakeholders dalam pembuatan keputusan yang dilakukan secara formal, berorientasi konsensus, dan melalui perundingan (Gambar 1). Mereka melakukan penelitian terhadap 137 kasus *collaborative governance* dengan mengembangkan sebuah model dan kemudian mengujinya. Model tersebut digunakan melihat faktor-faktor

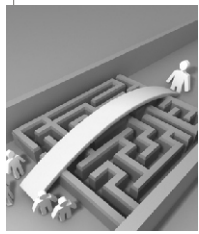
kontingensi yang mendorong/menghambat proses kolaborasi. Model tersebut memasukan faktor-faktor kritis yang menentukan keberhasilan proses kolaborasi yaitu kondisi awal, rancangan kelembagaan, dan kepemimpinan. Kondisi awal terdiri dari kepercayaan, konflik, dan modal sosial yang menjadi pendukung atau penghambat kolaborasi. Rancangan kelembagaan menyusun aturan-aturan dalam proses kolaborasi. Kepemimpinan memberikan peran penting dalam memediasi dan memfasilitasi proses kolaborasi. Proses kolaborasi merupakan siklus yang meliputi: *face to face dialogue, trust-building, commitment to process, shared understanding, dan intermediate outcomes*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat tiga faktor kontingensi inti yaitu waktu, kepercayaan, dan saling ketergantungan, dimana terjadi dampak interaktif antara kepercayaan dan saling ketergantungan. Saling ketergantungan memupuk partisipasi dan komitmen untuk kolaborasi yang lebih bermakna, dan kepercayaan dapat dibangun dalam situasi saling ketergantungan yang tinggi. Johnston, et al. (2010) kemudian menindaklanjuti penelitian dan membuktikan secara empiris bahwa jika proses keterlibatan pada struktur *collaborative governance* tersebut dikelola dengan baik, maka hal tersebut dapat menjadi kekuatan dalam menciptakan



Gambar 1.

Model Collaborative Governance

Sumber: Anshell and Gash, 2008. *Collaborative Governance in Theory and Practice*.
 Journal of Public Administration Research and Theory Vol 8 (4): 543-571



penguatan siklus kepercayaan, komitmen, pengertian, komunikasi, dan hasilnya, yang merupakan indikator keberhasilan *collaborative government*.

Terdapat perbedaan *governance* dalam administrasi publik dan perencanaan (Verma, 2010). Dalam administrasi publik, *governance* lebih memerlukan kepercayaan, transparansi dan akuntabilitas, dan ini berkaitan dengan kemauan dari aktor yang dapat membuat pilihan yang salah atau benar jika dihadapkan pada incentives. Sementara itu, *governance* dalam perencanaan memperlihatkan sebuah model pembelajaran dimana upaya untuk merubah persepsi dan pilihan dianggap lebih mendasar. Paradigma *governance* dalam perencanaan mencerminkan pendekatan yang lebih halus. Maksudnya adalah bahwa paradigma tersebut merupakan sebuah etos daripada hanya atribut. Etos memerlukan sensitivitas dan keterlibatan yang lebih besar. Dalam konteks partisipasi, tanda adanya partisipasi muncul ketika kepercayaan (*trust*) dan keterlibatan (*engagement*) menguasai sistem.

Perencanaan yang *co-exist* dengan konsep *governance* adalah perencanaan kolaborasi (Healey, 2006), karena pendekatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Perencanaan kolaborasi saat ini mendominasi *urban planning* (Allmendinger, P. and Mark Tewdwr-Jones, 2002: 216). Dengan melihat karakteristik perencanaan kolaborasi, maka pendekatan perencanaan ini dapat digunakan sebagai upaya mengatasi masalah-masalah pembangunan, termasuk diantaranya permasalahan lingkungan.

Salah satu masalah lingkungan yang sulit dipecahkan di kota-kota besar adalah sampah. Sampah adalah buangan dari suatu proses produksi. Produksi dapat terjadi mulai skala individu, rumah tangga, industri, atau perkantoran. Menurut jenisnya, sampah bervariasi; ada yang padat/cair/gas, basah/kering, atau organik/anorganik. Proses produksi berjalan tiap waktu, tiap hari, sehingga volumenya bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitasnya. Kenyataannya jumlah sampah terutama di perkotaan, terus bertambah. Komposisi terbesar adalah sampah organik yang dihasilkan rumah tangga. Pada tahun 2010, jumlah sampah di Kota Bandung mencapai 7.500 meter kubik, sedangkan yang terangkut mencapai 4 ribu meter kubik (Detik, 13 Juni 2010). Dengan demikian, sisanya kemana? Sisanya menumpuk di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), menunggu sampai diangkut pada giliran pengangkutan berikutnya, ada pula yang dibuang ke sungai. Sampah yang

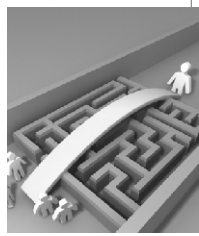
menumpuk di TPS dan dibuang ke sungai menimbulkan masalah pencemaran, yang dapat diikuti oleh munculnya bencana lain seperti penyakit pernafasan atau kulit bagi penduduk sekitar, atau banjir untuk sungai yang dipenuhi sampah. Bahkan sampah yang telah sampai di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) pun dapat menjadi bencana, seperti yang pernah terjadi di TPA Leuwi Gajah Bandung. Timbunan sampah yang ada menimbulkan ledakan dan longsor yang menewaskan 143 orang pada tanggal 21 Februari 2005 (Koran Jakarta, 28 Februari 2010) Dengan demikian terlihat bahwa sampah menjadi masalah dari mulai proses pengangkutan sampai pengolahannya.

Sampah memerlukan penanganan serius karena sampah memiliki dampak eksternalitas. Menurut pengertian ekonomi, eksternalitas adalah kerugian atau keuntungan yang diderita atau dinikmati pelaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi lain yang tidak tercermin dalam harga pasar. Dengan demikian, dampak eksternalitas sampah adalah bahwa sampah telah memberikan pengaruh negative terhadap pihak lain yang tidak membuangnya tapi harus "membayarinya". Masalah sampah adalah masalah bersama. Masalah rumah tangga, instansi pemerintah, sektor swasta, karena sampah dihasilkan oleh kita semua. Untuk itu, penanganannya pun harus dilakukan bersama, karena tidak bisa hanya dilakukan salah satu pihak. Beberapa upaya sudah digunakan untuk mengatasi permasalahan ini, namun belum memberikan hasil yang optimal. Semua pihak yang terlibat baik yang menghasilkan, yang terkena dampak, maupun yang mengelola sampah, seyogyanya bekerjasama dengan menggunakan suatu mekanisme tertentu. Mekanisme tersebut dilakukan mulai dari proses perencanaan, kemudian implementasi serta evaluasinya. Dengan memandang perlunya keterlibatan pihak-pihak terkait, maka pendekatan perencanaan kolaborasi dapat dipertimbangkan menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah sampah di kota besar.

C. KARAKTERISTIK PERENCANAAN KOLABORATIF (*COLLABORATIVE PLANNING*)

Perencanaan kolaborasi merupakan perencanaan yang berorientasi pada para pemangku kepentingan, melibatkan stakeholders (Healey, 2006: xii; Ellin, dalam Graham and Healey, 1999; Allmendinger, P. and Mark Tewdwr-Jones, 2002: 206), dan tidak dibatasi oleh





tempat - *Eucledian space* - dan waktu (Graham and Healey, 1999). Perencanaan kolaborasi didasari oleh konsep structuralist dari Gidden dan *communicative action* dari Habermas, sehingga dalam prosesnya perencanaan kolaborasi meliputi proses komunikasi, dialog, dan transaktif (Graham and Healey, 1999; Healey, 2006). Proses ini merupakan proses saling belajar antar pelaku, sehingga masing-masing mendapatkan pengetahuan akan permasalahan yang dihadapi melalui dialog yang terstruktur, yang pada akhirnya akan saling menguntungkan.

Perencanaan kolaborasi akan berhasil jika ada ketergantungan antar pelaku (Innes and Booher, 2000) dan konsensus (Healey, 2006; Innes, 1996; Forester, 1989: 47; Margerum, 2002). Saling ketergantungan tersebut memupuk partisipasi dan komitmen untuk proses kolaborasi yang bermakna, dan sangat memungkinkan untuk membangun kepercayaan dalam situasi saling ketergantungan yang tinggi (Ansell dan Gash, 2008). Saling ketergantungan akan menimbulkan keinginan untuk berkompromi, untuk akhirnya bisa mencapai konsensus.

Hal yang mendasar dari proses kolaborasi adalah negosiasi yang terstruktur dalam pengambilan keputusan, dan konsensus merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan bersama (Gunton and Day, 2003). Dengan demikian, terbentuknya konsensus merupakan suatu hasil dari proses yang bersifat demokratis, partisipasi yang terstruktur, serta membutuhkan waktu dan kesabaran. Lebih jauh, menurut Innes dan Booher (2000), dialog yang dilakukan untuk mencapai konsensus harus merupakan *Authentic Dialogue*, bukan retorika atau ritual. Masing-masing pembicara memiliki legitimasi, berbicara dengan sungguh-sungguh, membuat pernyataan yang dapat dipahami oleh orang lain, serta menyampaikan pernyataan yang akurat. Dialog demikian akan menghasilkan *reciprocity, relationships, learning, and creativity*.

Dengan mengelaborasi konsep *Collaborative Governance* dan *Collaborative Planning* di atas, maka dapat dilihat bahwa proses kolaborasi merupakan aspek utama dalam perencanaan kolaborasi. Proses kolaborasi merupakan suatu proses "*penggodogan*" pendapat dari berbagai pihak yang akhirnya menghasilkan suatu pendapat yang disepakati bersama, yaitu sebuah konsensus. Dalam proses yang terdiri dari berbagai tahapan yaitu upaya terbangunnya komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, hasil sementara, dialog otentik, dan kepercayaan. Tahapan-tahapan ini merupakan suatu siklus sehingga terjadi proses pembelajaran didalamnya.

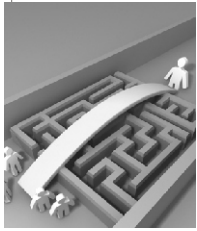
Beberapa penelitian berkaitan tentang proses

kolaborasi sudah dilakukan. Anshell dan Gash (2007) mengemukakan *Model Collaborative Governance* dengan inti proses kolaborasi, yang dipengaruhi oleh kondisi awal (partisipasi), rancangan kelembagaan, dan kepemimpinan. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kepercayaan dan saling ketergantungan merupakan faktor kontingensi inti dan terjadi dampak interaktif antara keduanya. Adanya ketergantungan antar pelaku dalam proses kolaborasi didukung oleh Kraft dan Johnston (2003) serta Innes dan Booher (2000). Johnston (2010) menindaklanjuti penelitian Anshell dan Gash, menyimpulkan bahwa proses keterlibatan pada struktur *collaborative governance* dapat menjadi kekuatan dalam menciptakan penguatan siklus kepercayaan, komitmen, pengertian, komunikasi.

Meski terlihat ideal, proses kolaboratif masih banyak ada yang meragukan keefektifannya, baik karena prosesnya maupun landasan ideologinya. Menyatukan beberapa pendapat yang berbeda dan kemudian menghasilkan suatu kesepakatan, terlihat sangat ideal, tapi bukan pekerjaan mudah. Proses kolaborasi sulit diterapkan karena merupakan proses yang memiliki banyak tuntutan dan hal tersebut membutuhkan banyak waktu, memberikan hasil yang kepastiannya rendah, dan kurangnya komitmen dari para pemangku kepentingan yang menyebabkan perselisihan dalam kelompoknya (Johnston, 2010). Selain itu, keterlibatan publik yang bebas dan tanpa hambatan untuk mengatasi masalah-masalah bersama, merupakan ketidakmungkinan secara konseptual (Mouffe, 1999). Berkaitan dengan perencanaan kolaborasi, Palermo dan Ponzini (2010) berpendapat bahwa perencanaan kolaboratif yang dikemukakan Healey memiliki resiko penyederhanaan ideologi dan pemikiran yang keliru.

D. PRAKTIK PERENCANAAN KOLABORASI DALAM PENANGANAN SAMPAH

Praktik perencanaan kolaborasi dalam pengelolaan lingkungan telah dilakukan, dan memberikan hasil bahwa perencanaan kolaborasi memberikan hasil yang cukup memuaskan, meskipun masih terdapat keterbatasan-keterbatasan dalam implementasinya. Sacramento Water Forum, yang terdiri dari para pemangku kepentingan (organisasi lingkungan, bisnis, kota-kota, pertanian), melakukan suatu dialog dalam proses pengambilan keputusan dalam isu hangat tentang transportasi dan penggunaan lahan di daerah tersebut (Innes dan Booher, 2000).



Gunton dan Day (2003) telah melakukan pengamatan terhadap beberapa penelitian evaluasi tentang perencanaan kolaborasi yang diterapkan pada permasalahan lingkungan yaitu dalam tata guna lahan, pengelolaan sampah, daerah aliran sungai. Kesimpulannya adalah bahwa perencanaan kolaborasi sangat memberikan manfaat. Keberhasilan penerapan perencanaan kolaboratif tidak terlepas dari adanya tantangan-tantangan keterbatasan penerapan. Adapun kriteria keberhasilan perencanaan kolaborasi yang digunakannya adalah:

1. pencapaian kesepakatan
2. efisiensi proses kolaborasi dibandingkan dengan proses alternatif lain
3. kepuasan para pemangku kepentingan terhadap proses dan hasilnya
4. manfaat untuk modal sosial seperti memperbaiki hubungan antar para pemangku kepentingan dan peningkatan keterampilan.

Tahap-tahap kolaborasi yang diidentifikasi yang perlu diperhatikan adalah tahap pre-negosiasi, negosiasi, dan pasca-negosiasi.

Perencanaan kolaborasi memerlukan adanya partisipasi aktif dari pihak-pihak yang terlibat karena berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Bahkan menurut tangga partisipasi Arnstein (1969), kolaborasi hanya dapat terjadi bila partisipasi masyarakat berada pada tangga tertinggi. Namun hal ini tidak berarti masyarakat Indonesia tidak dapat melakukannya. Penataan kawasan Kali Code menjadi bukti nyata terjadinya proses kolaborasi. Kawasan tersebut disulap dari kawasan kumuh yang penuh dengan resiko, tidak layak dijadikan hunian, menjadi kawasan yang layak huni dan sedap dipandang (Mitchell, Setiawan, Rahmi, 1997). Saat itu terjadi proses yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat secara aktif. Mereka terlibat dari mulai perencanaan sampai dengan implementasinya.

Selain itu, pelajaran dapat diambil dari pemindahan pedagang kakil lima di kota Solo pada tahun 2006. Ardiansyah (2009) menulis bahwa keberhasilan tersebut telah melewati proses dialog panjang, hingga 54 kali pertemuan. Bersama wakilnya, dan para kepala dinas, setiap Jumat pagi (dua minggu sekali) Jokowi bersepeda berkeliling kampung. Dia ajak pedagang makan siang atau makan malam. Mereka yang bersuara vokal didatangi. Keinginan mereka seperti apa, lalu didengarkan. Tempat dialog bisa di mana saja, mulai dari warung kecil, pinggir jalan, lokasi PKL Banjarsari, hingga di Loji Gandrung (rumah dinas wali kota). Ketika komunikasi sudah terjalin,

konsep penataan PKL disusun Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan disosialisasikan kepada pedagang. Proses berlanjut dengan perencanaan pembangunan, pelaksanaan, baru relokasi. Model pendekatan yang digunakan adalah dialogis dan komunikatif yang mengusung misi nguwongke wong cilik (memberi martabat pada orang kecil) membuahkan hasil. Pada Juli 2006 sebanyak 989 pedagang yang berusaha di Monumen 45 Banjarsari sejak 1998 mau pindah ke Pasar Klithikan Notoharjo, Semanggi, tanpa paksaan. Karena itu penerapannya pada pengelolaan sampah, bukanlah hal yang mustahil.

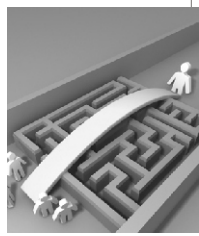
University of Michigan (2006) melakukan penelitian terhadap perencanaan kolaborasi pada perencanaan tata guna lahan, pengelolaan hutan, lingkungan ketetanggan (neighbourhood) di delapan wilayah State Trust Land. Berdasarkan hasil penyelidikan terhadap proses kolaborasi, maka diketahui bahwa tahapan kolaborasi yang dilakukan adalah:

1. Memutuskan kapan berkolaborasi
2. Menyusun proses untuk mencapai keberhasilan
3. Menentukan siapa yang berpartisipasi
4. Mengorganisasikan proses
5. Menyusun struktur pembuatan keputusan
6. Membantu peserta bekerja bersama
7. Membagi informasi
8. Mengimplementasikan kesepakatan

Terlepas dari keterbatasannya, bila tahapan tersebut diaplikasikan dalam pengelolaan sampah, maka tahapan proses kolaborasi dapat dilihat kemungkinannya sebagai berikut:

1. Ketika memutuskan kapan berkolaborasi, yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kelompok/individu pemangku kepentingan yang potensial untuk berkolaborasi. Para pemangku kepentingan adalah mereka yang menghasilkan sampah, yang terkena dampak, dan yang menangani sampah. Mereka yang menghasilkan sampah diantaranya adalah rumah tangga, industri, pasar, perkantoran, rumah sakit, yang terkena dampak adalah masyarakat umum, dan yang menangani adalah pemerintah dan masyarakat. Harus dipastikan bahwa yang akan diajak dalam proses kolaborasi adalah pemangku kepentingan yang memiliki potensi untuk memberikan pendapat, kontribusi, tidak memiliki masalah hukum. Kontribusi yang mereka dapat berikan adalah dalam bentuk keuangan, pendapat, atau profesionalitas.
2. Selanjutnya adalah menghubungi para pemangku kepentingan yang potensial, dan menilai seberapa besar ketertarikan dan





kepentingan mereka dalam proses partisipasi. Kemudian menganalisis situasi dan kemungkinan-kemungkinan para pemangku kepentingan dalam memberikan waktu, pendapat, dana, dan upaya. Juga melihat apakah masalah dapat dikelola dalam diskusi secara efektif dan alternatif proses yang mungkin. Yang tak kalah penting adalah mendapatkan dukungan dan sumber daya dari lembaga pembuat keputusan, misalnya instansi pemerintah terkait seperti Badan Perencanaan Daerah dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

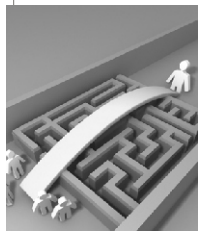
3. Menentukan siapa yang berkolaborasi. Orang yang ditunjuk adalah orang yang benar-benar mewakili kepentingan para pemangku kepentingan, bukan kepentingan pribadi. Misalnya untuk kelompok rumah tangga, apakah kemungkinannya seorang ketua RT (Rukun Tetangga)? Selain itu juga menentukan rencana yang jelas untuk memilih mereka, menentukan peran dan tanggung jawab mereka, dan melibatkan aparatur pemerintah terkait.
4. Mengorganisasikan proses kolaborasi, dengan mengambil variasi struktur kolaborasi yang sudah teruji, dan memungkinkan keterlibatan lembaga swadaya masyarakat. Selain itu juga menyusun jadwal perencanaan. Proses kolaborasi mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama, karena suatu tahapan mungkin dilakukan dalam beberapa kali. Selain itu bisa disebabkan karena sulitnya mendapatkan waktu yang sesuai diantara para individu yang mewakili para kelompok pemangku kepentingan. Proses yang dilakukan di Kali Code memakan waktu lima tahun (1989-1995), proses pemindahan para pedagang kaki lima (PKL) di Kota Solo memakan waktu setahun dengan komunikasi intensif antara walikota dengan pedagang, sampai akhirnya para PKL mau pindah tanpa paksaan.
5. Membuat struktur pembuatan keputusan yang menjelaskan pembagian peran dan wewenang. Harus dibedakan antara kekuasaan dan kewenangan untuk membuat keputusan dan dijelaskan bagaimana kekuasaan didistribusikan pada proses kolaborasi tersebut. Hal tersebut harus disepakati dan tertulis. Semua peserta harus memahami aturan pembuatan keputusan yang disepakati. Catatan minor harus dikumpulkan, sehingga memudahkan ketika terjadi kesulitan dalam pengambilan keputusan.
6. Membangun partisipasi aktif semua peserta

dalam aktivitas formal and informal selama proses kolaborasi berjalan. Kepentingan-kepentingan yang tersirat harus teridentifikasi. Kesalahan komunikasi harus dihindarkan, serta dapat membangun saling kepercayaan satu sama lain. Membangun komunikasi efektif dan mendorong masyarakat umum untuk memberikan masukan dan umpan balik.

7. Menyusun agenda pertemuan secara rutin diantara para peserta sehingga setiap informasi dan kemajuan diketahui dan dipahami semua peserta. Jangan menganggap semua peserta paham hanya karena mereka mengikuti proses yang terjadi. Menggali informasi ilmiah dan mencari sumber daya lain yang diperlukan sebelum melangkah lebih lanjut.
8. Untuk mengimplementasikan kesepakatan, maka pertama fokus pada penyusunan kesepakatan, membuat indikator untuk keberhasilannya, menyusun struktur implementasinya, serta menyusun agenda pertemuan untuk memonitor implementasi kesepakatan tersebut. Kesepakatan yang dihasilkan untuk pengelolaan sampah tersebut harus difahami dan dapat diimplementasikan oleh semua pemangku kepentingan.

Langkah-langkah tersebut akan sangat dipengaruhi oleh kondisi di lapangan. Perubahan dan penyesuaian akan terjadi tergantung dari dinamika yang terjadi. Perencana tidak hanya memahami secara proses perencanaan, tetapi karakteristik dan kebiasaan masyarakat yang dan pihak-pihak lain yang terlibat. Untuk masyarakat Indonesia yang masih belajar melaksanakan demokrasi, melakukan proses kolaborasi tentu bukan suatu hal yang mudah. Peran kepemimpinan yang mampu menggerakkan masyarakat sangat penting.

Selanjutnya, Brand dan Graffikin (2007), berdasarkan hasil penelitiannya menemukan bahwa pada lingkungan yang tidak kolaborasi (dengan kehidupan demokrasi yang rendah dalam sistem politiknya dimana situasi sosial di-depolitikasi dan marketised), pendekatan yang dilakukan menegaskan politik keterhubungan (*connectivity*) dan keakraban (*propinquity*). Dengan demikian, pada masyarakat *non-collaboratif*, daripada berupaya mentransfer pengetahuan melalui advokasi lebih baik berupaya untuk bertukar pengetahuan dalam pluralism secara cerdas, melalui persuasi bukan pemaksaan. Secara metodologi, para perencana saat ini seyogyanya tidak hanya memfasilitasi dan memediasi keterlibatan secara aktif, tetapi juga memiliki keahlian dalam menafsirkan untuk selanjutnya melakukan analisis. Hasil penelitian di atas



memperlihatkan bahwa seorang perencana dituntut untuk lebih dapat memaknai sistem budaya yang berlaku.

E. PENUTUP

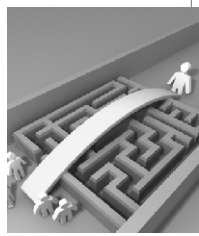
Perencanaan kolaborasi merupakan perencanaan yang memerlukan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan. Perencanaan ini telah diterapkan dalam pengelolaan lingkungan. Di negara-negara maju, penerapan pendekatan ini menunjukkan keberhasilan. Namun di negara-negara berkembang pun terdapat peluang keberhasilannya, meski memerlukan upaya yang lebih keras, karena karakteristik masyarakat yang secara demokrasi masih berkembang. Demokrasi adalah kondisi yang diinginkan dalam perencanaan partisipasi, karena dengan kondisi demikian, maka masyarakatnya lebih mudah berpartisipasi aktif, dan memiliki kemampuan berkomunikasi dan berdialog.

Dengan melihat keberhasilan perencanaan kolaborasi pada pengelolaan lingkungan, maka pendekatan ini tidak mustahil dilakukan dalam pengelolaan sampah. Keterlibatan dan komitmen para pemangku kepentingan dari mulai masyarakat, perguruan tinggi, LSM, pengusaha, dan pemerintah sangat diperlukan. Keterlibatan ini diakomodir dalam suatu bentuk proses kolaborasi untuk menghasilkan keputusan yang akan dilaksanakan bersama. Keberhasilan proses kolaborasi akan sangat ditentukan oleh keaktifan peserta kolaborasi dan kemampuan perencana dalam memahami karakteristik masyarakat dan permasalahan yang ada.

REFERENSI

- Allmendinger, P. and Mark Tewdwr-Jones. 2002. *Planning Futures; New Directions for Planning Theory*. London: Routledge.
- Anshell, C. and Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Publik Administration Research and Theory. Vol 18:543-571. Advance Access published November 13, 2007
- Ardiansyah, Dedy. 2009. *Belajar dari Jokowi, Walikota Solo - Cara Solo Mendongkrak PAD dari PKL*.
http://www.harian-global.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28016%3Abelajar-dari-jokowi-walikota-solo-cara-solo-mendongkrak-pad-dari-pkl&Itemid=55. Diunduh pada tanggal 23 Nopember 2010
- Arnstein, Sherry R. 1969. *A Ladder of Citizen Participation*, JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224.
<http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html>. Diunduh tanggal 25 Nopember 2010
- Brand, R. & Gaffikin F. 2007. *Collaborative Planning in an Uncollaborative World*. Planning Theory November 2007 vol. 6 no. 3 282-313
- Bovaird, T., Loffler, E. (2005). *The Changing Context of Public Policy*. In Bovaird, T., Loffler, E. (Eds.), *Public Management and Governance* (pp13-23). New York: Taylor & Prancis
- Forester, John. 1989. *Planning in the Face of Power*. California: The Univ. of California Press.
- Graham, S. and Healey, P. 1999. *Relational concepts of space and place: issues for planning theory and practice*. *European Planning Studies*, 7(5), pp. 623-646
- Gunton & Day. 2003. *The Theory and Practice of Collaborative Planning in Resource and Environmental Management*.
http://www.entrepreneur.com/tradejournals/article/111855596_2.html. Diunduh pada tanggal 11 Maret 2011
- Johnston, E. et al. 2010. *Managing the Inclusion Process in Collaborative Governance*. Journal of Publik Administration Research and Theory. muq045 first published online August 19, 2010 doi:10.1093/jopart/muq045
- Healey, Patsy. 2006. *Collaborative Planning, Shaping Places in Fragmented Societies*. 2nd ed. New York. Palgrave Macmillan.
- Innes, JE. 1996. *Planning Through Consensus Building, a New View of Comprehensive Planning Ideal*. Journal of American Planning Association Vol. 62 Issue 4. http://www.cip-icu.ca/_CMS/Files/Innes,%20Judith.pdf. Diunduh pada tanggal 13 Desember 2010
- Innes, JE. & Booher, D.E. 2000. *Collaborative Dialogue as a Policy Making Strategy*. Institute of Urban and Regional Development UC Berkeley. IURD Working Paper. <http://escholarship.org/uc/item/8523r5zt>
- Johnston, E. et al. 2010. *Managing the Inclusion Process in Collaborative Governance*. Journal of Publik Administration Research and Theory. muq045 first published online August 19, 2010 doi:10.1093/jopart/muq045
- Margerum, R.D. 2002. *Building Consensus and Building a Distinct Model for Practice*. Collaborative Planning Journal of Planning Education and Research March vol. 21 no. 3 237-253
- McCarney, P.L. (1996). *Considerations on the Notion of "Governance" - New Direction for cities in the Developing World*. In McCarney, P.L. (Ed.). *Cities and Governance, New Direction in Latin America, Asia, and Africa*, pp 3-20. Center for Urban and Community Studies. Toronto: Univ. of Toronto Press Incorporated.
- Mitchell, Setiawan, Rahmi. 1997. *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*. Gajah Mada Univ. Press.
- Mouffe, C. (1999) *Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism*, Social Research, Vol. 66, No. 3, pp.745-758.
- Palermo, P.C. and Ponzini. 2010. *Spatial Planning and Urban Development, Critical Perspective*. Springer





- Smutko, L. Steven. 2008. *Managing Stakeholder Involvement in Three Ordinance Development*. Powerpoint slide presentation presented at: 2008 North Carolina Urban Forestry Conference, September 20, 2008 Greensboro, NC.
<http://www.ncsu.edu/nrli/resources/PresentationsandWorkingPapers.php>. Diunduh pada tanggal 5 Maret 2011.
- University of Michigan. 2006. *Study for the State Trust Lands Partnership Project of the Sonoran Institute and the Lincoln Institute of Land Policy*. Building Trust: Lessons From Collaborative Planning on State Trust Lands.
http://www.lincolnst.edu/subcenters/managing-state-trust-lands/publications/collaborative_planning_stl.pdf. Diunduh pada tanggal 26 April 2011
- Verma, N. 2010. *Governance and Planning: A Pragmatic Approach, in Planning Theory, Conceptual Challenges for Spatial Planning*. Healey and Hillier, Ed. Surrey: Ashgate Publ. Ltd.
- Detik, Selasa, 13/07/2010 10:54 WIB
<http://bandung.detik.com/read/2010/07/13/105459/1398078/486/2010-pd-kebersihan-targetkan-tekan-volume-sampah-hingga-8-persen> diunduh pada tanggal 26 April 2011
- Koran Jakarta, 28 Pebruari 2010. *TPA Lewi Gajah, Tragedi terbesar kedua di dunia*. <http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=46220>. Diunduh pada 11 Maret 2011.

